



WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR **87** TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kotamobagu tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1218);
 10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 (PKPT) Inspektorat Daerah, dengan program dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 (PKPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu yang dilaksanakan oleh Inspektorat.
- KETIGA : Inspektur Daerah dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 (PKPT), melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Kotamobagu, Gubernur Sulawesi Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Inspektorat Daerah harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah, Desa, dan Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan rekomendasi.
- KELIMA : Inspektur Daerah di bawah koordinasi Wakil Wali Kota Kotamobagu mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, melakukan pemantauan, pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU, f



TATONG BARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 87 TAHUN 2023
TANGGAL
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUN INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN 2023

URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (quality assurance) dan konsultan (consulting) antara lain :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di daerah serta lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu akan melaksanakan pengawasan intern dan pengawasan lainnya dengan tema meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, berbasis e-Government, dan berbasis risiko, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala atau reguler secara tematik sesuai dengan isu yang ada sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan risiko yang timbul seperti:
 - 1) Pemeriksaan ketaatan dan kinerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan dan Kantor).
 - 2) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa.
 - 3) Pemantauan/Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan APIP dan Pemeriksa Eksternal.
 - 4) Melaksanakan Reviu, Evaluasi dan Pemeriksaan Khusus atau Audit Investigatif.
2. Pengawasan lainnya berdasarkan permintaan Pimpinan daerah dan kewenangan Inspektorat seperti:

- 1) Monitoring/Pemantauan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Wali Kota Kotamobagu.
- 2) Pemeriksaan fisik/opname kas dan barang persediaan Perangkat Daerah.
- 3) Pemeriksaan serentak atas ketaatan hari masuk kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya.
- 4) Menyelenggarakan pmutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan.
- 5) Melakukan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- 6) Klarifikasi/konfirmasi pengaduan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Standar Audit Intern Pemerintah dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor PER-01/AAIPI/ DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
8. Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
10. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe B.
11. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Investigatif.

C. TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang pedoman Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Inspektorat Daerah

Kota Kotamobagu Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk Tahun 2023 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan Pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2023;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

D. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu dalam melaksanakan pengawasan difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
- b. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat daerah meliputi:
 - 1) Kinerja rutin pengawasan:
 - a) Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah
 - b) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah (RKAP)
 - c) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - d) Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
 - e) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - f) Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - g) Reviu rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)
 - h) Reviu Laporan Kinerja (LKjIP)
 - i) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - j) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan
 - k) Pemeriksaan Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah
 - l) Pemeriksaan Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan
 - m) Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
 - n) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - o) Pemeriksaan Investigatif terhadap Pengaduan Masyarakat dan Perhitungan Keuangan Daerah
 - p) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
 - q) Probity Audit
 - r) Evaluasi Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas
 - s) Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
 - t) Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - u) Pendampingan Pembangunan Reformasi Birokrasi
 - v) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLHP BPK) serta TLHP Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - 2) Pengawasan Prioritas Nasional.
 - a) Tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama

Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b) Pengawasan Pengelolaan Vaksin
- c) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender
- d) Monitoring Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- e) Monitoring Pengendalian Gratifikasi
- f) Sosialisasi Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang Dikoordinasikan oleh Stranas PK
- g) Sosialisasi Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang Dikoordinasikan KPK
- h) Sosialisasi Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

E. BENTUK KEGIATAN DAN HASIL PENGAWASAN

Bentuk kegiatan dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu tahun 2023 adalah :

1. Pemeriksaan/Audit Kinerja Perangkat Daerah

Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Kegiatan audit ini dilaksanakan atas Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan serta Program Pengelolaan Pendidikan di Dinas Pendidikan. Tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, dimana aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya (input), maupun pemanfaatannya. Aspek efisiensi adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh. Aspek efektifitas adalah aspek yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Sasaran yang ingin diwujudkan dari Pedoman Audit Kinerja adalah tujuan audit yang secara rinci menjabarkan apa yang telah ditentukan dalam tujuan audit.

Hasil dari pemeriksaan tersebut berbentuk laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan risiko yang lebih besar terjadi. Laporan Hasil Pengawasan di kirim kepada Wali Kota dengan tembusan Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPK RI dan perangkat daerah terkait.

2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa;

Untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan desa adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Termasuk pemeriksaan terhadap aspek keuangan tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

Mengingat lemahnya pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang dibuktikan dengan banyaknya temuan dan aduan masyarakat yang kemudian bermuara pada proses hukum, maka kegiatan pemeriksaan ini diusahakan terlaksana di seluruh Desa Kota Kotamobagu. Sasaran Pemeriksaan ini adalah:

- a) Efektivitas pengelolaan keuangan desa
- b) Pengelolaan keuangan dan aset desa
- c) Pengelolaan keuangan BUMDesa
- d) Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa
- e) Kualitas belanja desa
- f) Pengadaan barang/jasa desa
- g) Pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.

Pemeriksaan ini dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan disampaikan kepada Wali Kota Kotamobagu, BPK RI, Desa dan perangkat daerah atau pihak-pihak terkait.

3. Pemeriksaan Investigatif adalah dalam rangka penanganan pengaduan dengan sasaran :

- a) Penyalahgunaan Kewenangan
- b) Hambatan dalam pelayanan masyarakat
- c) Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- d) Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Dibuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit dan disampaikan kepada Wali Kota Kotamobagu, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan pihak-pihak terkait.

4. Pemeriksaan lainnya seperti audit ketaatan terhadap akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, audit terhadap pengelolaan barang milik daerah, dan Probit Audit dibuat dalam Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan dan disampaikan kepada Wali Kota Kotamobagu, Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait.
5. Kegiatan Reviu, Evaluasi dan Pemantauan/Monitoring, Pendampingan dan Sosialisasi mempunyai sasaran/tujuan sesuai pada Matrik Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023 serta dilaporkan dalam bentuk LHR yang kemudian disampaikan kepada Wali Kota Kotamobagu dan pihak-pihak terkait.

F. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu selaku Pembantu Wali Kota yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan pengawasan lainnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terpadu (*Joint Audit*) dengan BPKP atau bersama instansi terkait;
2. Melayani dan membuka klinik konsultasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu serta temuan dan rekomendasi BPK RI;
4. Menyelenggarakan pemuktahiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan (gelar pengawasan/*coffee morning*);

5. Menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan di bidang pengawasan;
6. Melakukan Reviu atau pendampingan lainnya kepada Perangkat Daerah dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah atas ketaatan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
7. Mengadakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) atas tuntutan ganti rugi terhadap ASN dan pihak ketiga dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu serta kegiatan rapat penunjang dari Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D).

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, jumlah anggaran, skala prioritas atau risiko serta isu strategis dan mandatori akan melaksanakan pengawasan sesuai Matriks Program Kerja Pengawasan Tahunan pada 33 (tiga puluh tiga) perangkat daerah, 15 (lima belas) BUMD, 15 (lima belas) Desa (kurang lebih 15 (lima belas) BUMDesa) terhitung mulai bulan Maret 2023 sampai bulan Desember 2023.

H. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun 2023 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2023
TANGGAL
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023

MATRIKS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN ANGGARAN 2023

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Reviu KPD oleh PIP	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg-II, Mei dan Septem ber 2023	Mg-I, Juni dan Oktober 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Reviu RKA oleh APIP	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.	Mg-II, April dan Oktober 2023	Mg-II, Mei dan Oktober 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	

 

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Reviu KPD oleh PIP	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Mg II Februari dan Juli 2023	Mg II Maret dan Agustus 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
				Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023													
Reviu PBJ oleh APIP	4	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Mg-III Maret, Juni, September, November 2023	Mg-II April, Juli, Oktober, Desember 2023	4	4	4	4	8	24	14,008,733.62	4	Laptop, ATK	Tinggi	
Reviu DAK	3	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.	Mg-III Januari, Mei dan September 2023	Mg-IV Februari, Juni dan Oktober 2023	3	3	3	3	6	18	10,506,550.22	3	Laptop, ATK	Tinggi	
Reviu Rancangan Akhir Renja OPD	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Juni dan Desember 2023	Mg IV, Juni dan Desember 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Reviu perencanaan UA-PPAS	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg-II, Februari dan Agustus 2023	Mg-II, Maret dan Agustus 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Pemeriksaan kuantabilitas pengelolaan pendapatan daerah	1	Audit Ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Juli 2023	Mg IV, Juli 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
Pemeriksaan kuantabilitas pengelolaan belanja daerah	1	Audit Ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Juli 2023	Mg IV, Juli 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
Pemeriksaan pengelolaan pembiayaan daerah	1	Audit Ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Januari 2023	Mg III, Januari 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
Pemeriksaan pengelolaan manajemen kas dan persediaan	1	Audit Ketaatan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Juli 2023	Mg III, Juli 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
emeriksaa engelolaa BMD	1		Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I April 2023	Mg IV April 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
		Audit Ketaatan															
robity udit	13	ATT	Mentaati prosedur pengadaan sesuai ketentuan, sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	PM	PM	13	13	13	13	26	78	45,528,384.28	13	Laptop, ATK	Tinggi	
reviu aporan inerja	2	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I, Maret dan Septem ber 2023	Mg IV, Maret dan Septem ber 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Reviu LPPD	1	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Februari i 2023	Mg IV Februari i 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
PD TT: Perhitunga n kerugian keuangan daerah	2	ATT	untuk membuktikan dugaan penyimpangan/kecurangan	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	PM	PM	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender	1	Evaluasi	Evaluasi atas hasil pelaksanaan penilaian efektifitas perencanaan dan penganggaran	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Januari 2023	Mg IV Januari 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
memeriksa pengelolaan keuangan desa	60	Reviu	Kesesuaian dokumen berdasarkan regulasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I April, Juli, Oktober dan Desember 2023	Mg IV April, Juli, Oktober dan Desember 2023	60	60	60	60	120	360	210,131,004.37	60	Laptop, ATK	Tinggi	
pendampingan penerapan SPM	6	Asistensi	Memastikan kesesuaian penerapan SPM	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember 2023	Mg IV Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan Desember 2023	6	6	6	6	12	36	21,013,100.44	6	Laptop, ATK	Tinggi	
Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN	2	Monitoring	Memastikan pelaporan telah terlaksana	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Maret 2023	Mg IV Maret 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Pengendalian gratifikasi	2	Monitoring	Memastikan tidak ada praktik gratifikasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Mei dan November 2023	Mg IV Mei dan November 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
elaksanaa survei penilaian integritas	2	Monitorin g	Memastikan survey telah dilaksanakan	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Mg I Novemb er 2023	Mg I Desemb er 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
penilaian mandiri reformasi birokrasi	2	Evaluasi	Evaluasi atas hasil pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Maret - Des 2023	Mg I Desemb er 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
sistensi pembangu an reformasi birokrasi	2	Asistensi	Memastikan pembangunan reformasi birokrasi telah tepat dilaksanakan	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Maret - Des 2023	Mg I Desemb er 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Capaian aksi pencegahan korupsi yg dikoordina sikan oleh Stranas PK	2	Sosialisas i	Meningkatkan pemahaman terhadap aksi pencegahan korupsi yg dikoordinasikan oleh Stranas PK	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Maret - Des 2023	Mg I Desemb er 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordina	2	Sosialisas i	Pemahaman terkait dengan program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Maret - Des 2023	Mg I Desemb er 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kan KPK																	
Operasional Sasi sapu bersih Pungutan liar (Saber ungli)	4	Audit Operasional	Pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	PM	PM	4	4	4	4	8	24	14,008,733.62	4	Laptop, ATK	Tinggi	
emeriksaa Investigatif	2	ATT	untuk membuktikan dugaan penyimpangan/kecurangan	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	PM	PM	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
TL Perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	2	Monitoring	Menilai pelaksanaan TL perjanjian kerja sama APIP dan APH terkait pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Mg II Maret dan Des 2023	Mg I V April dan Des 2023	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
Monev TLHP BPK serta TLHP APIP	6	Monitoring	Mendapatkan informasi yang relevan dan akurat terkait TLHP Fungsional	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Mg I Maret dan Des 2023	Mg IV Maret dan Des 2023	6	6	6	6	12	36	21,013,100.44	6	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kapabilitas PIP Level	4	Consulting	Meningkatkan pemahaman terhadap upaya untuk Kapabilitas APIP menuju Level 3	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Mg I Maret dan Juli 2023	Mg IV Maret dan Juli 2023	4	4	4	4	8	24	14,008,733.62	4	Laptop, ATK	Tinggi	
Maturitas PIP	4	Evaluasi	Meningkatkan pemahaman terhadap upaya untuk mencapai maturitas APIP	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Mg I Maret dan Des 2023	Mg IV Maret dan Des 2023	4	4	4	4	8	24	14,008,733.62	4	Laptop, ATK	Tinggi	
Penerapan manajemen risiko	43	Consulting	Meningkatkan pemahaman terhadap upaya untuk penerapan Manajemen risiko	Permendagri No 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	Mg I Januari dan Maret 2023	Mg IV Januari dan Maret 2023	43	43	43	43	86	258	150,593,886.46	43	Laptop, ATK	Tinggi	
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	1	Evaluasi	Menilai pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	- Permendagri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender -Permendagri No 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	Mg I Mei dan November 2023	Mg IV Mei dan November 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	

Area Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS /IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	35	Evaluasi	Menilai pelaksanaan kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Maret sampai dengan Des 2023	Maret sampai dengan Des 2023	35	35	35	35	70	210	122,576,419.21	35	Laptop, ATK	Tinggi	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPARAN	1	Audit Kinerja	Penilaian terhadap 3 E (efisien, ekonomis dan efektifitas)	Dinas Lingkungan Hidup	Mg I Mei 2023	Mg IV Mei 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	Audit Kinerja	Penilaian terhadap 3 E (efisien, ekonomis dan efektifitas)	Dinas Pendidikan	Mg I Mei 2023	Mg IV Mei 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	Audit Operasional	Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan	Dinas PUPR	Maret dan Des 2023	Maret dan Des 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Audit Operasional	Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana kegiatan	Dinas Kesehatan	Maret dan Des 2023	Maret dan Des 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Audit Kepatuhan	Ketataan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya	BKPP	Mg I Juli 2023	Mg IV Juli 2023	1	1	1	1	2	6	3,502,183.41	1	Laptop, ATK	Tinggi	

Jenis Pengawasan	JUMLAH PP	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALNIS/IRBAN	KT	AT	Jumlah					
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DIATAN KONSULTANSI	2	Consulting	Membantu penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi	Seluruh OPD yang membutuhkan bantuan Inspektorat	PM	PM	2	2	2	2	4	12	7,004,366.81	2	Laptop, ATK	Tinggi	
TOTAL	229												802,000,000.00				

KWALI KOTA KOTAMOBAGU,


TATONG BARA